

## PENANGGULANGAN PRA BENCANA ALAM TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE

Ichwan Nurutdin Machruf<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung  
ichwannurutdin@gmail.com

### Abstrak

Bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang meresahkan masyarakat, karena dampaknya yang dapat menyebabkan beragam kerusakan dan korban jiwa. Upaya pra bencana harus dapat dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari kejadian bencana alam. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana alam terutama bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu di Kabupaten Lampung Selatan menyisakan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat akan adanya ancaman bencana alam tsunami di kemudian hari. Upaya kolaboratif akan sangat membantu untuk dapat memaksimalkan upaya-upaya pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan konsep *collaborative governance* yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi dalam upaya pra bencana alam tsunami telah dilakukan, mulai dari kesiapan anggaran, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Aktor-aktor kebencanaan seperti BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat dan lembaga usaha telah berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana guna mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana alam tsunami yang dapat terjadi kapan saja di Kabupaten Lampung Selatan.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Bencana Alam, Penanggulangan Bencana

### Abstract

*Natural disaster is one of public problems troubling society because the impact can leave damages and fatalities behind. The effort of the countermeasure of the pre-natural disaster should be increased in order to suppress the impact. As a prone place to natural disaster, Tsunami, South Lampung District have ever experienced its catastrophe in December 22, 2018 when a huge wave hit and left a big worry. Due to that, the government starts to focus on pre-collaborative resolutions compatible with the Collaborative Governance concept as the way to prevent Tsunami that might come anytime. The collaboration of the countermeasure of pre-natural disaster has been arranged starting from the budget readiness, the availability of facilities and infrastructures and human resources, the preparedness, and the mitigation. The actors of the countermeasures like Regional Disaster Management Office (BPBD) of South Lampung District, Social Services Office of South Lampung District, citizens and business institutions have collaborated to anticipate and prevent the Tsunami that might hit the coast of South Lampung District.*

**Key Words:** *Collaborative Governance, Natural Disasters, Pre-disaster response*

## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya ancaman bencana. Kehadiran suatu bencana akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengakibatkan banyak

kerusakan dan juga kerugian bagi negara. Melakukan upaya-upaya pencegahan guna mempersiapkan kehadiran suatu bencana harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal

33 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi : 1) pra bencana, 2) saat tanggap darurat, 3) dan pasca bencana. Upaya pra bencana menjadi tahapan yang sangat penting untuk dapat dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik.

Fenomena bencana khususnya bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain yaitu berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa sehingga menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata terbaik di provinsi Lampung, kendati demikian Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah yang rawan akan bencana alam, terutama bencana alam tsunami.

Bencana alam tsunami terakhir kali terjadi di Kabupaten Lampung Selatan pada 22 Desember 2018 lalu dan berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, ada sebanyak 118 orang yang meninggal, 5.329 orang luka-luka, 7 orang hilang dan sebanyak 710 rumah masyarakat yang rusak akibat dari adanya bencana alam tsunami tersebut.

Keresahan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ini tentu menjadi sebuah masalah publik yang harus dapat segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya pra bencana guna mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan saat bencana alam tsunami terjadi. Paradigma yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan salah satunya adalah konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* atau kerjasama kolaboratif dimaknai sebagai sebuah proses dimana orrgnisasi-organisasi

yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri (Sink dalam Dwiyanto, 2015 : 253).

Memandang persoalan bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif *collaborative governance* dapat menjadi salah satu solusi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam menangani masalah ini. Kerjasama kolaboratif dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sektor swasta dan juga aktor-aktor kebencanaan guna melakukan upaya-upaya pra bencana untuk bersiap dalam menghadapi bencana alam tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Penerapan konsep *collaborative governance* dalam menghadapi persoalan bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan khususnya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan persiapan pra bencana akan dapat memaksimalkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tsunami. Manfaat lain dengan adanya kerjasama kolaboratif dalam mengatasi masalah bencana alam tsunami adalah pemerintah akan mendapatkan dukungan sumberdaya dari masyarakat dan sektor swasta, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta, terjaringnya aspirasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Mengingat bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana tsunami, dan juga pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, terutama pada tahap pra bencana yang dinilai masih kurang dimaksimalkan serta guna melihat sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk mengantisipasi bencana alam tsunami yang dapat mungkin terjadi kapan saja di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, menjadi hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif *Collaborative Governance*".

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan mengulas tentang Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif *Collaborative Governance*. Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penanggulangan bencana dan juga *Collaborative Governance*. Peneliti telah mengambil dua hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
<b>Nama</b>	Dwi Jokowiarno	Tika Mutiarawati	Ichwan Nurutdin Machruf
<b>Judul</b>	Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Lampung	<i>Collaborative Governance</i> dalam penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i>
<b>Tujuan</b>	Untuk mendeskripsikan kegiatan Mitigasi yang bisa diadopsi dan dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian	Bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan banjir	Mendeskripsikan upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami sebelum dan setelah kejadian tsunami

	akibat tsunami di wilayah pesisir Lampung	pasang surut di Kelurahan Bandengan dan juga untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambatnya	2018, dan mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami tersebut ke dalam konsep <i>collaborative governance</i>
<b>Fokus</b>	Fokus penelitian : mendeskripsikan poin-poin strategis yang terdiri atas komponen-komponen SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dan kebijakan-kebijakan yang dapat diadopsi dalam upaya mitigasi bencana tsunami di wilayah pesisir Lampung	Fokus penelitian : Mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan dan untuk mengetahui faktor yang menghambatnya	Fokus penelitian : Mendeskripsikan apa saja upaya penanggulangan pra bencana yang sudah dilakukan sebelum dan setelah kejadian tsunami pada Tahun 2018 dan mengidentifikasi upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan ke dalam konsep

			<i>collaborative governance</i>
<b>Hasil</b>	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa minimal terdapat 6 langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan mitigasi bencana tsunami yaitu : 1) melakukan upaya perlindungan kehidupan , 2) meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat pesisir, 3) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, 4) meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, 5) menyusun produk	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan tidak dilakukan secara optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan , lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM.	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan dalam bentuk, persiapan anggaran, menyediakan sarana pra sarana dan sumber daya manusia, upaya-upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Sebelum kejadian tsunami 2018 upaya kolaboratif dalam penanggulangan pra bencana tsunami di Kabupaten Lampung

	hukum yang mengatur pelaksanaan mitigasi, 6) mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui melakukan kegiatan mitigasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan		Selatan belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan , akan tetapi setelah kejadian tsunami 2018 upaya proses kolaborasi berhasil ditingkatkan dengan adanya langkah progressif dalam upaya pra bencana
--	---	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

Setelah membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari segi tujuan penelitian, terdapat perbedaan antara ketiga penelitian di atas yaitu, penelitian pertama bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan mitigasi yang bisa diadopsi dan dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat tsunami di wilayah pesisir Lampung, penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan dan juga untuk dapat mengetahui faktor yang menghambatnya, dan penelitian yang ketiga bertujuan untuk dapat mendeskripsikan upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami sebelum dan setelah kejadian

tsunami pada tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan, dan juga untuk dapat mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan tersebut ke dalam konsep *collaborative governance*.

Dari ketiga penelitian diatas juga terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Pada penelitian pertama fokus penelitian di analisis menggunakan SWOT, fokus pada penelitian kedua dianalisis dengan menggunakan indikator keberhasilan sebuah kolaborasi dari De Seve, dan penelitian ketiga fokus penelitian di analisis ke dalam konsep proses kolaborasi dari Ansell dan Gash. Dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian ini berbeda dari segi fokus penelitian dan teori yang digunakan.

Untuk hasil penelitian juga terdapat perbedaan diantara ketiga penelitian tersebut. Hasil penelitian merujuk pada hal-hal yang menjadi fokus penelitian masing-masing dari penelitian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga penelitian diatas baik dari segi tujuan penelitian, fokus penelitian, sampai pada hasil penelitian. Adanya penelitian terdahulu dapat peneliti jadikan referensi apabila ada hal-hal dari penelitian tersebut yang dapat mendukung penelitian yang peneliti laksanakan tentang Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif *Collaborative Governance*.

### **Collaborative Governance**

Selama beberapa dekade terakhir, sebuah bentuk pemerintahan yang baru telah muncul untuk menggunakan mode manajerial dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Hadirnya konsep *collaborative governance*, pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash dalam Islamy, 2018:1).

Emerson mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dari pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan

masyarakat, swasta, NGO, dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan jika dilakukan sendiri (Emerson dalam Mashudi dan Luluk, 2019 : 7).

Dalam teori dan praktek tentang konsep *collaborative governance* (Ansell dan Gash dalam Subarsono, 2015 : 175) mendefinisikannya sebagai: "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets". *Collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan suatu kebijakan publik atau untuk dapat mengelola program dan aset publik.

Merujuk dari berbagai pendapat para ahli mengenai *collaborative governance* peneliti berpendapat bahwa *collaborative governance* merupakan kerjasama sinergis yang dilakukan oleh pemerintah, sektor private dan juga masyarakat serta aktor-aktor lainnya dalam menentukan arah pembangunan atau kebijakan publik untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada ditengah masyarakat. *Collaborative governance* telah membuka ruang untuk semua aktor agar dapat turut berkontribusi secara nyata dalam pembangunan dan penyelesaian masalah, mulai dari merumuskan, melaksanakan sampai pada tahap pengawasan suatu kebijakan.

Tujuan *collaborative governance* adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama. *Collaborative governance* juga bertujuan agar aktor diluar pemerintah seperti masyarakat dan sektor swasta juga terlibat dalam menentukan arah kebijakan atau dalam melaksanakan sebuah program (Mashudi dan luluk, 2019 : 417). Salah satu dari beberapa hal yang menjadi sebab

mengapa pemerintah melakukan praktek *collaborative governance* yaitu karena masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini tidak akan dapat untuk dikelola secara efektif dan efisien apabila hanya mengandalkan satu organisasi saja. Pemerintah membutuhkan mekanisme berbeda dan bersifat fleksibel. Kolaborasi antara berbagai sektor dibentuk untuk mengatasi masalah (Mc Guire dalam Sabaruddin, 2015: 34).

Menurut Ansell dan Gash ada empat variabel utama dalam proses *collaborative governance* yaitu :

a. Kondisi Awal

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar aktor, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda-beda yang dapat menghasilkan sebuah hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan dalam hal ini adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan juga menjadi salah satu aspek penting dalam kolaborasi. Menurut Ryan tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

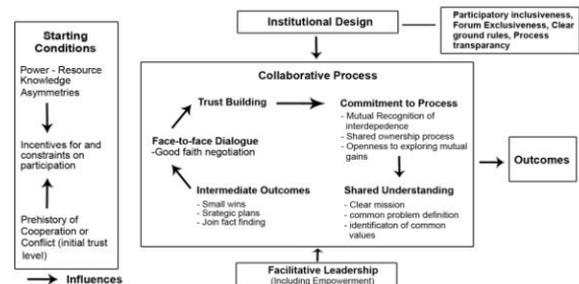
1. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
2. Pengelolaan kemampuan untuk dapat melaksanakan kredibilitas teknis
3. Memastikan bahwa proses kolaborasi tersebut dapat diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor (Ryan dalam Harmawan, B.N., dkk, 2017 :52)

d. Proses Kolaborasi

Dalam hal ini kolaborasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Face to Face
2. Membangun Kepercayaan
3. Komitmen Terhadap Proses
4. Pemahaman Atas Keputusan Bersama
5. Hasil Sementara

Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



(Sumber : Ansell dan Gash dalam Islamy, 2018:14)

*Collaborative governance* versi Ansell dan Gash menurut penulis sangat cocok untuk dapat digunakan dalam penelitian ini karena dalam *collaborative governance* versi Ansell dan Gash tersebut dijelaskan beberapa variabel penting dalam kolaborasi yaitu, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan sampai pada proses kolaborasi.

Peneliti menilai bahwa *collaborative governance* versi Ansell dan Gash akan dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan juga menganalisis penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif *collaborative governance* secara komprehensif. Indikator-indikator proses kolaborasi dalam model ini akan memudahkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis secara terstruktur, mulai dari tahap dialog tatap muka antar berbagai aktor dalam mengawali proses kolaborasi, kemudian membangun kepercayaan antar aktor, komitmen terhadap proses kolaborasi yang dilaksanakan, saling memahami atas segala keputusan yang telah disepakati,

sampai pada hasil sementara dari rangkaian proses kolaborasi yang telah dilaksanakan.

## Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering sekali dilanda bencana, terutama bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat dibawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor dibawah laut, atau hantaman meteor di laut (Buku Saku BNPB Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. 2012 :7)

## Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dipikirkan dan juga dipersiapkan secara matang oleh pemerintah baik dari segi kebijakan ataupun langkah-langkah untuk dapat mengantisipasi dan menanggulanginya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi : 1) pra bencana, 2) saat tanggap darurat, 3) dan

pasca bencana. Ketiga tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut harus dapat dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini peneliti fokus pada penanggulangan bencana pada tahap pra bencana guna melihat sejauh mana upaya-upaya pra bencana yang sudah dilakukan oleh berbagai aktor kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan untuk menjawab adanya ancaman bencana tsunami di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menjelaskan bahwa penanggulangan bencana menjadi tugas bersama seluruh aktor dan upaya pra bencana menjadi tahap awal yang sangat penting untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan saat kejadian bencana guna meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari bencana itu sendiri.

## III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada Penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan pada :

1. Penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sebelum dan setelah kejadian tsunami 2018 di Lampung Selatan
2. Penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif *collaborative governance*. Untuk mengidentifikasi ke dalam konsep *collaborative governance* peneliti menggunakan variabel proses kolaborasi dari Ansell dan Gash yang terdiri dari :
  - a. Face to Face
  - b. Membangun Kepercayaan
  - c. Komitmen Terhadap Proses
  - d. Pemahaman Atas Keputusan Bersama
  - e. Hasil Sementara.

Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan juga data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan observasi secara langsung ke lapangan, sedangkan data

sekunder diperoleh dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai rujukan teori.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model interaktif, dimana dalam analisis ini terdiri dari 3 alur kegiatan secara bersamaan, yaitu :Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami Sebelum dan setelah Kejadian Tsunami 2018 di Lampung Selatan

Penanggulangan pra bencana harus dapat dimaksimalkan guna mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan saat terjadi bencana. Kejadian tsunami pada 22 Desember 2018 lalu yang menimpa beberapa daerah di Kabupaten Lampung Selatan menimbulkan cukup banyak kerusakan dan korban jiwa dan dapat menjadi sebuah pelajaran dan evaluasi bagi setiap aktor kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat memaksimalkan upaya-upaya pra bencana.

##### Kolaborasi Dalam Upaya Kesiapan Anggaran

Anggaran atau bisa disebut sebagai keuangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk juga dalam upaya pra bencana alam tsunami. Persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan dan disiapkan dengan baik oleh pemerintah, dan *stakeholder* lain diluar pemerintah sebagai suatu upaya pra bencana untuk memaksimalkan keseluruhan proses penanggulangan bencana tsunami.

Merujuk pada hasil penelitian, anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pra bencana alam tsunami bersumber dari RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang diusulkan setiap tahunnya oleh perangkat daerah yang memiliki program atau kegiatan-kegiatan penanggulangan pra bencana seperti BPBD Lampung Selatan dan Dinas Sosial Lampung Selatan. Ada juga biaya tak terduga sebagai

anggaran yang telah disiapkan untuk dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pokok para korban bencana saat situasi bencana.

Proses kolaborasi antar aktor dalam upaya persiapan anggaran bersifat koordinasi antara Bappeda Lampung Selatan sebagai perencana anggaran dengan perangkat daerah yang memiliki rencana kerja anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pra bencana. RKA yang diusulkan setiap perangkat daerah akan dikoreksi oleh Bappeda untuk kemudian dapat diusulkan menjadi APBD

Tabel 2. Kolaborasi Dalam Upaya Kesiapan Anggaran (Sebelum Kejadian Tsunami 2018)

Aktor Kolaborasi		Peran Aktor
<b>Bappeda Selatan</b>	<b>Lampung</b>	Menyusun Anggaran Daerah, untuk kemudian diusulkan menjadi APBD
<b>BPBD Selatan</b>	<b>Lampung</b>	Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) berisi program kerja dan rencana anggaran yang dibutuhkan.
<b>Dinas Lampung Selatan</b>	<b>Sosial</b>	Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) berisi program kerja dan rencana anggaran yang dibutuhkan.
Proses Kolaborasi		
BPBD dan juga Dinas Sosial Lampung Selatan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menangani persoalan bencana termasuk bencana tsunami, menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana tsunami, kemudian rencana kerja anggaran yang telah disusun itu akan dikoordinasikan dengan Bappeda Lampung Selatan sebagai perencana anggaran di daerah untuk kemudian dapat diusulkan menjadi APBD.		

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Tabel 3. Kolaborasi Dalam Upaya Kesiapan Anggaran (Setelah Kejadian Tsunami 2018)

Aktor Kolaborasi		Peran Aktor
<b>Bappeda Selatan</b>	<b>Lampung</b>	Menyusun Anggaran Daerah, untuk kemudian diusulkan menjadi APBD
<b>BPBD Selatan</b>	<b>Lampung</b>	Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) berisi program kerja dan rencana anggaran yang dibutuhkan.
<b>Dinas Lampung Selatan</b>	<b>Sosial</b>	Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) berisi program kerja dan rencana anggaran yang dibutuhkan.

<b>Masyarakat Desa</b>	Mengalokasikan sebagian dana desa untuk dapat mendukung kegiatan penanggulangan bencana
------------------------	---

**Proses Kolaborasi**

BPBD dan juga Dinas Sosial Lampung Selatan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menangani persoalan bencana termasuk bencana tsunami, menyusun rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tsunami, kemudian akan dikoordinasikan dengan Bappeda Lampung Selatan sebagai perencana anggaran di daerah untuk kemudian dapat diusulkan menjadi APBD. Masyarakat turut berperan dengan mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana seperti membangun sarana prasarana sebagai upaya mitigasi.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Setelah kejadian tsunami pada 22 Desember 2018 lalu, ada upaya progresif terkait dengan kesiapan anggaran untuk menghadapi bencana tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi lagi di kemudian hari yaitu adanya alokasi dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dengan adanya partisipasi masyarakat melalui dana desa, upaya kesiapan anggaran menjadi lebih optimal.

**Kolaborasi Dalam Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia**

Mempersiapkan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang mumpuni merupakan salah satu dari upaya pra bencana tsunami yang juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah dan juga aktor-aktor kebencanaan. Tanpa adanya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, akan sangat sulit untuk dapat memaksimalkan kegiatan penanggulangan pra bencana.

Merujuk pada hasil observasi dan juga wawancara peneliti dengan para informan terkait dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang disiapkan untuk menghadapi bencana tsunami, dapat diketahui bahwa BPBD Lampung Selatan memiliki beberapa sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pra bencana dan saat terjadi bencana, mulai dari alat pendeteksi gempa, radio komunikasi sampai dengan kendaraan-kendaraan operasional seperti motor, mobil *pick up*, truk, *ambulance* sampai dengan *speed boat*. Secara personil BPBD Lampung Selatan punya satgas siaga bencana

dan juga beberapa DESTANA (Desa Tangguh Bencana) yang telah dibentuk di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan

Disisi lain, Dinas Sosial Lampung Selatan juga punya gudang logistik dan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Secara personil atau sumber daya manusia, mereka punya personil yang senantiasa siap untuk menghadapi kejadian bencana. Secara personil Dinas Sosial punya yang namanya TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan juga KSB (Kampung Siaga Bencana) yang telah dibentuk di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, tentu ini menjadi tambahan personil yang akan membantu untuk memaksimalkan seluruh tahapan kegiatan penanggulangan bencana.

Aktor-aktor kebencanaan lain seperti Satpolpp, Tentara, Polisi, PMI dan tenaga kesehatan menjadi aktor pendukung yang membantu memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam kegiatan penanggulangan bencana tsunami. Sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki aktor-aktor ini akan membantu kinerja BPBD Lampung Selatan sebagai koordinator penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugasnya.

Tabel 4. Kolaborasi Dalam Ketersediaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia (Sebelum Kejadian Tsunami 2018)

<b>Aktor Kolaborasi</b>	<b>Peran Aktor</b>
<b>BPBD Lampung Selatan</b>	Mempersiapkan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia serta telah membentuk DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan
<b>Dinas Sosial Lampung Selatan</b>	Mempersiapkan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia serta telah membentuk KSB (Kampung Siaga Bencana) di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan
<b>Masyarakat</b>	Adanya personil Desa Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana yang menjadi aktor kebencanaan di Desa.
Aktor Pendukung (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, PMI, Tentara, Polisi dan Satpolpp) Aktor-aktor ini berperan dalam menyediakan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia	

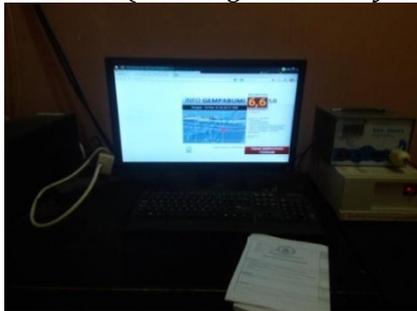
untuk memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana tsunami.

### Proses Kolaborasi

BPBD dan juga Dinas Sosial Lampung Selatan saling melengkapi dalam hal sarana prasarana dan juga sumber daya manusia (personil) yang saling bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tsunami seperti kegiatan pelatihan dan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

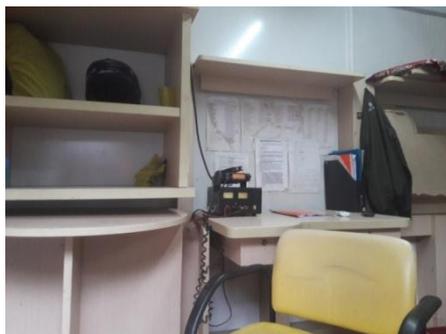
Gambar 2. WRS (*Warning Receiver System*)



Sumber : Hasil Observasi 2020

WRS (*Warning Receiver System*) merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan informasi saat terjadi gempa bumi dan juga akan memberikan peringatan dini seandainya ada potensi akan terjadi bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Alat dari BMKG ini akan langsung memberikan informasi kepada BPBD Lampung Selatan apabila terjadi gempa bumi ataupun adanya potensi akan terjadi bencana tsunami.

Gambar 3. Radio Komunikasi



Sumber : Hasil Observasi 2020

Gambar diatas merupakan radio komunikasi yang sudah ditempatkan di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai alat untuk berkoordinasi antara masyarakat dengan BPBD Lampung Selatan. Setiap harinya masyarakat dari setiap kecamatan

melaporkan situasi terkini di daerahnya melalui alat ini.

Setelah kejadian tsunami pada tahun 2018, upaya kolaborasi dalam hal sarana prasarana dan sumber daya masih sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh para aktor kebencanaan seperti sebelum kejadian tsunami 2018. Bedanya ada beberapa hal yang telah dapat dimaksimalkan oleh berbagai aktor seperti menambah sarana prasarana dan membentuk KSB di beberapa desa.

Gambar 4. Alat Sensor Tinggi Rendah Permukaan Laut



Sumber : Hasil Observasi 2020

Gambar di atas merupakan salah satu alat yang dipasang untuk dapat mengetahui apabila permukaan laut naik ataupun turun secara signifikan. Hal ini untuk dapat mengantisipasi kejadian seperti bencana tsunami pada tahun 2018 kemarin yang terjadi tanpa didahului gempa. Dengan demikian akan ada persiapan lebih awal untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 5. Ketersediaan Sarana dan Sumber Daya Manusia Setelah Kejadian Tsunami 2018

No	Sebelum Kejadian Tsunami	Kejadian Tsunami	Setelah Kejadian Tsunami
1	Belum adanya alat untuk mendeteksi apabila air laut naik atau turun secara signifikan		Telah dipasang alat untuk mendeteksi apabila air laut naik atau turun secara signifikan
2	Ada 3 Kampung Siaga Bencana yang dibentuk sebelum kejadian tsunami di Lampung Selatan		Ada 4 Kampung Siaga Bencana yang dibentuk setelah kejadian tsunami di Lampung Selatan jadi total berjumlah 7 KSB

3	Alat Komunikasi dulu ada di setiap desa namun sempat sebelum tsunami	Radio	Alat Radio Komunikasi kembali didistribusikan untuk yang sekarang ditempatkan di kecamatan
---	--	-------	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari data-data yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam hal sarana prasarana dan sumber daya manusia dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sarana prasarana dan SDM yang dimiliki oleh setiap aktor kebencanaan untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

### Kolaborasi Dalam Upaya Kesiapsiagaan

Upaya yang juga sangat penting untuk dapat dilakukan pada tahap pra bencana adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Bencana alam tsunami merupakan peristiwa yang akan datang kapan saja atas izin sang pencipta, oleh karena itu seluruh stakeholder kebencanaan harus senantiasa siap kapan saja untuk dapat mengantisipasi kehadirannya.

Merujuk pada data-data hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kejadian bencana tsunami yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan melaksanakan piket 24 jam, adanya wajib lapor bagi masyarakat terkait kondisi terkini di daerahnya, menyiapkan sarana prasarana untuk evakuasi dan juga memaksimalkan koordinasi dengan para personil kebencanaan. Selanjutnya sebagai upaya kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kejadian tsunami yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan ronda malam, memaksimalkan linmas, kemudian juga menyediakan sarana komunikasi seperti HT untuk mempermudah koordinasi antar aparat desa.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga telah membuat sebuah grup *Whats App*

sebagai salah satu instrumen untuk dapat memperkuat koordinasi antar aktor kebencanaan. Setiap harinya informasi perkembangan gunung Anak Krakatau disampaikan melalui grup *Whats App* ini kepada setiap aktor kebencanaan. Hal ini merupakan hal sangat penting karena gunung Anak Krakatau merupakan salah satu hal yang dapat memicu terjadinya bencana tsunami.

Gambar 5. Grup *Whats App* Siaga Bencana Lampung Selatan



Sumber : Hasil Observasi 2020

Gambar diatas merupakan grup *Whats App* “Siaga Bencana Lamsel” yang telah dibuat sebagai upaya kesiapsiagaan dan sebagai tempat bertukar informasi dan berkoordinasi antar stakeholder kebencanaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 6. Kolaborasi Dalam Upaya Kesiapsiagaan Sebelum Kejadian Tsunami 2018

Aktor	Peran Aktor
<b>Kolaborasi</b>	
<b>BPBD Lampung Selatan</b>	Melaksanakan piket selama 24 jam secara terorganisir dan melakukan monitoring setiap harinya untuk mengetahui kondisi terkini di daerah-daerah melalui laporan yang disampaikan masyarakat melalui radio komunikasi. Membuat grup <i>Whats App</i> Siaga Bencana Lamsel untuk memudahkan koordinasi dan menyampaikan informasi.
<b>Dinas Sosial Lampung Selatan</b>	Memaksimalkan peran Taruna Siaga Bencana dan personil Kampung Siaga Bencana untuk dapat menyampaikan informasi secara cepat apabila ada potensi bencana tsunami.
<b>Masyarakat</b>	Mendistribusikan HT kepada aparaturnya untuk dapat memudahkan koordinasi terkait adanya potensi bencana tsunami dan juga memaksimalkan peran Linmas untuk berjaga dan menyampaikan informasi secara cepat.

**Aktor Pendukung**

(BMKG dan Pos Pantau Gunung Anak Krakatau)

Aktor-aktor ini berperan dalam memberikan informasi terkini terkait adanya potensi bencana tsunami kepada seluruh aktor.

**Proses Kolaborasi**

BPBD, Dinas Sosial dan juga masyarakat memaksimalkan koordinasi untuk dapat memperkuat upaya kesiapsiagaan. Masyarakat melakukan wajib lapor setiap harinya kepada BPBD melalui Radio Komunikasi. BMKG dan Pos Pantau Gunung Anak Krakatau memberikan informasi terkait potensi bencana tsunami.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Setelah kejadian tsunami pada 2018 lalu, upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh setiap aktor kebencanaan masih sama seperti sebelum kejadian tsunami 2018 lalu. Setiap aktor kebencanaan memaksimalkan kembali upaya-upaya yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi potensi bencana tsunami di kemudian hari.

**Kolaborasi Dalam Upaya Mitigasi**

Upaya mitigasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bagian dari upaya

pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman suatu bencana.

Memaksimalkan upaya mitigasi menjadi suatu hal yang harus dilakukan pada tahap pra bencana oleh semua stakeholder kebencanaan agar dapat mengurangi dampak dari kejadian bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu kontribusi dan partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan mitigasi ini.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal mitigasi atau pengurangan resiko bencana, semua aktor kebencanaan telah melakukan kegiatan mitigasi baik yang sifatnya pengadaan sarana prasarana maupun kegiatan yang sifatnya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya ancaman bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Ada juga kegiatan pelatihan dan juga simulasi bencana tsunami untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Semua aktor telah turut berkontribusi dalam melaksanakan upaya mitigasi dengan kegiatan masing-masing. BPBD punya yang namanya DESTANA (Desa Tangguh Bencana) yang telah diberikan banyak pelatihan untuk bagaimana menghadapi kejadian bencana. Dinas Sosial punya yang namanya KSB (Kampung Siaga Bencana) yang kurang lebih kegiatan dan tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dinas Sosial juga punya kegiatan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah untuk dapat mengedukasi para pelajar untuk menghadapi bencana. Hal-hal inilah yang sudah dilakukan sebagai wujud upaya mitigasi sebelum kejadian tsunami pada tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 7. Kolaborasi Dalam Upaya Mitigasi Sebelum Kejadian Tsunami 2018

Aktor Kolaborasi	Peran Aktor
<b>BPBD Lampung Selatan</b>	Membangun sarana prasarana mitigasi seperti tanggul, pemecah ombak, membuat jalur evakuasi, membuat rambu penunjuk arah untuk evakuasi dan juga titik kumpulnya. Memberikan sosialisasi dan kegiatan pelatihan kepada masyarakat.
<b>Dinas Sosial Lampung Selatan</b>	Melaksanakan kegiatan TAGANA Masuk Sekolah untuk mendukung para siswa tentang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan BPBD sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
<b>CV. Prima</b>	Memberikan pelatihan kebencanaan kepada para karyawan dan juga membangun sarana fisik seperti jalur evakuasi sebagai bentuk upaya mitigasi dan pengadaan alat-alat seperti sirine dan tenda.
<b>Proses Kolaborasi</b>	
BPBD melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana bersama Dinas Sosial yang juga memberikan edukasi ke sekolah-sekolah melalui kegiatan Tagana Masuk Sekolah. CP Prima sebagai salah satu lembaga usaha turut melakukan upaya mitigasi dengan mengadakan pelatihan untuk para karyawannya bekerjasama dengan BPBD untuk memberikan materi pelatihan. Kegiatan yang dinisiasi oleh semua aktor kebencanaan dilakukan tanpa melupakan koordinasi dengan BPBD Lampung Selatan sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah.	

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Setelah kejadian tsunami 2018, upaya mitigasi yang dilakukan oleh setiap aktor masih sama hanya saja lebih dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaannya, sarana prasarana fisik untuk mitigasi seperti jalur evakuasi dan rambu evakuasi telah diperbanyak, masyarakat juga turut membangun sarana fisik untuk mitigasi seperti membuat tanggul untuk pemecah ombak. Adanya alokasi dana desa untuk kegiatan bencana membuat masyarakat dapat lebih mengoptimalkan upaya mitigasi.

Gambar 6. Jalur Evakuasi Bencana Tsunami



Sumber : Hasil Observasi 2020

Gambar diatas merupakan salah satu upaya mitigasi berupa pembangunan jalur evakuasi bagi masyarakat. Peneliti banyak sekali menemukan plang jalur evakuasi di daerah-daerah yang dekat sekali dengan pantai. Adanya jalur evakuasi dapat membantu masyarakat untuk dapat menuju ke arah yang aman saat terjadi bencana tsunami.

Gambar 7. Kegiatan Simulasi Bencana



Sumber : Hasil Observasi 2020

Gambar diatas merupakan salah satu contoh kegiatan simulasi bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya untuk melatih para personil Desa Tangguh Bencana dalam hal penyelamatan korban. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Merujuk pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya mitigasi telah dilakukan oleh berbagai aktor kebencanaan. Beragam upaya mitigasi seperti membuat jalur evakuasi dan tanggul serta melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan, tinggal bagaimana kemudian upaya-upaya ini dapat terus dimaksimalkan oleh setiap aktor

guna meminimalisir dampak dari kejadian tsunami yang dapat terjadi kapan saja di kemudian hari. Setiap aktor harus dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana.

### Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Collaborative Governance

Penanggulangan bencana yang merupakan tugas semua pihak, menuntut untuk adanya kerjasama lintas aktor dalam sebuah proses kolaborasi yang akan bergerak dan berusaha secara sinergis untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti tentang penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan akan dijabarkan dan dianalisis dengan menggunakan variabel proses kolaborasi dari Ansell dan Gash dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### a. Face to Face

*Collaborative governance* didasarkan pada *face to face* antar stakeholder sebagai proses konsensus untuk dapat menentukan tujuan dan juga menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus untuk dapat diselesaikan secara bersama-sama. *Face to face* atau dialog tatap muka antar stakeholder perlu untuk dapat dilakukan sebagai sebuah sarana untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama kedepan.

Tabel 8. Proses Face to Face

Aktor	Kegiatan/Upaya yang Dilakukan
BPBD Lampung Selatan	Mengadakan kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan dengan mengundang para aktor kebencanaan.
CP. Prima	Mengadakan kegiatan pelatihan kebencanaan kepada para karyawan dan mengundang BPBD Lampung Selatan sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut
Masyarakat	Mengundang BPBD Lampung Selatan dalam kegiatan musrenbang kecamatan.
Kendala	
Untuk kegiatan sosialisasi yang sifatnya	

berkelanjutan, kendalanya adalah peserta delegasi dari berbagai aktor terkadang berganti-ganti orang, sehingga peserta yang pada sosialisasi sebelumnya belum hadir belum paham dengan apa yang telah dibahas sebelumnya. Kendala selanjutnya adalah masih minimnya partisipasi lembaga usaha dalam kegiatan yang bersifat sosialisasi.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Merujuk pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dialog tatap muka antar aktor dalam proses kolaborasi sudah berjalan. Dialog tatap muka dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah. Berbagai kendala dalam proses dialog harus dapat diselesaikan oleh para aktor agar upaya dalam menentukan rencana kegiatan pra bencana menjadi lebih optimal.

### Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan aspek yang juga harus turut dikuatkan dalam proses kolaborasi. Adanya ikatan saling percaya antar aktor akan mengantarkan pada sebuah proses kolaborasi menuju tujuan bersama yang ingin dicapai. Untuk itu, sangat penting bagi setiap aktor untuk dapat meyakinkan aktor lain dalam proses kolaborasi, agar ikatan saling percaya dapat tumbuh dan kerjasama sinergis dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* yaitu adanya rasa saling percaya antar aktor (De Seve dalam Arianti, D. 2018: 9).

Tabel 9. Membangun Kepercayaan

Aktor	Upaya Yang Dilakukan
BPBD Lampung Selatan	Menjaga konsistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan membangun hubungan emosional yang baik dengan para aktor kebencanaan.
CP. Prima	Memaksimalkan peran sebagai lembaga usaha dan juga mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Masyarakat	Menyambut baik segala bentuk kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana dan juga berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Hal ini yang senantiasa diingatkan kepada masyarakat agar dapat membangun komitmen mereka dalam kegiatan penanggulangan pra bencana tsunami.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Merujuk pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk dapat membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi terkait dengan penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan para aktor kebencanaan mempunyai caranya masing-masing yang pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

### Komitmen Terhadap Proses

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Tinggi rendahnya komitmen para stakeholder dapat mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi. Seberapa besar komitmen dalam proses kolaborasi dapat dilihat dari sejauh mana konsistensi para stakeholder untuk senantiasa berperan aktif dalam proses kolaborasi. Keyakinan bahwa dengan proses kolaborasi akan dapat mengantarkan pada keuntungan bagi para aktor dan kepentingan publik akan memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi.

Tabel 10. Komitmen Terhadap Proses

Aktor	Upaya Yang Dilakukan
<b>BPBD Lampung Selatan</b>	Berusaha untuk menyadari bahwa peran aktor lain sangat dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Sehingga upaya yang dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan para aktor melalui komunikasi dan koordinasi.
<b>Dinas Sosial</b>	Senantiasa mengingat bahwa penanggulangan bencana merupakan masalah bersama dan peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, sehingga yang dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang menjadi tugas dari Dinas Sosial itu sendiri.
<b>CP. Prima</b>	Menyadari bahwa bencana tsunami juga merupakan masalah yang dihadapi perusahaan sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan senantiasa berkoordinasi dengan BPBD Lampung Selatan.
<b>Masyarakat</b>	Adanya potensi bencana tsunami dan kejadian tsunami 2018 lalu membuat kesadaran masyarakat akan bencana tsunami meningkat.

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun komitmen dalam proses kolaborasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendudukkan hal-hal yang menjadi tujuan bersama para aktor dalam upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan serta memperkuat hal-hal yang menjadi dasar terjadinya proses kolaborasi yaitu adanya keresahan dan masalah yang sama yang dirasakan semua pihak akan adanya ancaman bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Komitmen setiap aktor dalam proses kolaborasi sudah terbangun dengan baik, tinggal bagaimana setiap aktor dapat bekerjasama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

### Pemahaman Atas Keputusan Bersama

Dalam *Collaborative Governance*, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Inilah yang dimaksud *shared understanding* oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* (pemahaman keputusan bersama) merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative governance*, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersamaan

Tabel 11. Pemahaman Atas Keputusan Bersama

Aktor	Upaya Yang Dilakukan
<b>BPBD Lampung Selatan</b>	Memahami kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan setiap aktor dalam proses kolaborasi serta berupaya memaksimalkan kinerja sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
<b>CP. Prima</b>	Menyadari bahwa perusahaan berlokasi di daerah yang rawan

	akan bencana tsunami. Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan upaya yang dapat dilakukan sebagai lembaga usaha seperti dengan mengadakan kegiatan pelatihan untuk karyawan dan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah.
<b>Masyarakat</b>	Memahami adanya potensi bencana alam tsunami dengan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Memaksimalkan peran sebagai masyarakat dan juga berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Merujuk pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam memahami keputusan bersama antar aktor, setiap aktor punya caranya masing-masing, namun pada intinya sama yaitu dengan sama-sama saling memahami bahwa setiap aktor punya kepentingannya tersendiri dibalik fakta bahwa memang penanggulangan bencana memang tugas bersama semua aktor. Kesadaran bahwa adanya potensi bencana dan tujuan bersama untuk meminimalisir dampak bencana tsunami di kemudian hari membuat para aktor berupaya sesuai dengan kapasitas lembaganya masing-masing dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.

### Hasil Sementara

Tahap terakhir dalam proses kolaborasi adalah mengetahui hasil sementara yang telah diperoleh. Hasil ini akan dijadikan sebagai tindak lanjut dari pada praktek kolaborasi yang selama ini sedang terjalin. Hasil sementara ini dapat memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen di dalamnya.

Tabel 12. Proses Kolaborasi Dalam Upaya Penanggulangan Pra Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan

Variabel Kolaborasi	Proses	Upaya Yang Dilakukan
<b>Dialog Muka</b>	<b>Tatap</b>	Dialog tatap muka dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Lampung Selatan.
<b>Membangun Kepercayaan</b>		Setiap aktor punya caranya masing-masing dalam membangun kepercayaan mulai dari berupaya untuk memaksimalkan peran masing-masing, menjaga hubungan baik dengan berbagai aktor dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
<b>Komitmen Terhadap Proses</b>		Untuk menjaga komitmen terhadap proses kolaborasi hal yang dilakukan berbagai aktor diantaranya yaitu, menyadari bahwa bencana tsunami merupakan masalah bersama dan peran setiap aktor sangat dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan pra bencana tsunami.
<b>Pemahaman Atas Keputusan Bersama</b>		Pemahaman atas keputusan bersama dilakukan dengan cara saling memahami kepentingan dan kebutuhan setiap aktor dan juga memahami bahwa Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana tsunami.
<b>Aktor Utama Yang Terlibat</b>		
BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial, Masyarakat dan juga lembaga usaha dalam penelitian ini adalah CP Prima.		
<b>Aktor Pendukung dalam hal Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia</b>		
(Tentara, Polisi, Satpolpp, PMI, tenaga kesehatan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, RAPI dan BMKG)		
<b>Regulasi yang Mendukung Proses Kolaborasi</b>		
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.		
<b>Out Comes</b>		
Kesiapan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi		

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh berbagai aktor, namun yang menjadi aktor utama dalam hal ini adalah BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat dan juga lembaga usaha. Adapun aktor-aktor lain seperti PMI, Tentara, Polisi, Satpolpp, BMKG, RAPI dan tenaga kesehatan berperan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Variabel proses kolaborasi dari Ansell dan Gash sudah dilaksanakan oleh berbagai aktor kebencanaan mulai dari tahap dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman atas keputusan bersama sampai dengan hasil sementara dari proses kolaborasi itu. Secara keseluruhan proses kolaborasi berjalan dengan baik kendati ada beberapa masalah yang muncul seperti dalam hal dialog tatap muka.

Proses kolaborasi tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai upaya pra bencana alam tsunami mulai dari kesiapan anggaran, kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan juga upaya mitigasi yang pada intinya bertujuan untuk dapat meminimalisir dampak dari bencana alam tsunami yang dapat mungkin terjadi di kemudian hari.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Kesimpulan merupakan temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang peneliti buat mengenai Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif *Collaborative Governance* sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sebelum kejadian tsunami pada tahun 2018 dilakukan dengan beragam upaya mulai dari kesiapan anggaran, kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Aktor-aktor utama yang terlibat dalam penanggulangan pra bencana yaitu, BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial

Lampung Selatan, masyarakat dan juga lembaga usaha yang dalam penelitian ini adalah CP Prima. Aktor-aktor seperti Polisi, Tentara, PMI, tenaga kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan menjadi aktor pendukung dalam hal ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Kejadian tsunami pada 2018 yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa menjadi evaluasi bagi seluruh aktor kebencanaan untuk lebih memaksimalkan upaya pra bencana.

2. Setelah kejadian tsunami pada tahun 2018, upaya penanggulangan pra bencana tsunami di Lampung Selatan kurang lebih masih sama seperti saat sebelum kejadian tsunami, namun ada beberapa upaya yang telah dapat dimaksimalkan oleh para aktor kebencanaan diantaranya yaitu hal dalam kesiapan anggaran masyarakat telah turut mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana, dalam hal sarana prasarana adanya pengadaan alat pendeteksi tinggi rendah permukaan laut untuk mendeteksi potensi bencana tsunami yang tidak didahului gempa.
3. Rangkaian proses kolaborasi versi Ansell dan Gash mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman atas keputusan bersama telah dilaksanakan oleh para aktor kebencanaan walaupun ada beberapa kendala seperti dalam proses dialog tatap muka yaitu adanya pergantian peserta yang dikirim untuk menjadi delegasi dari para aktor kebencanaan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang sifatnya berkelanjutan, sehingga para peserta yang baru hadir menjadi tidak paham akan hal-hal yang telah dibahas pada kegiatan diskusi sebelumnya. Secara keseluruhan proses kolaborasi berhasil untuk dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor-aktor kebencanaan di Lampung Selatan mulai dari BPBD

Lampung Selatan, Dinas Sosial, masyarakat dan lembaga usaha.

### Saran

Kerjasama berbagai aktor kebencanaan dalam proses kolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan, sehingga terwujudnya kerjasama sinergis dalam upaya memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. BPBD Lampung Selatan harus dapat bermain peran dengan baik sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah untuk dapat mengajak dan menggerakkan seluruh aktor kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat turut berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan para aktor melalui kegiatan kunjungan lembaga ataupun meningkatkan koordinasi informal. Hal ini harus dapat dilakukan agar para aktor kebencanaan merasa bahwa peran mereka sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana. Dengan begitu, kerjasama antar pemerintah dan aktor kebencanaan lain dapat berjalan dengan baik sehingga dapat bersinergi untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dwiyanto, A. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Islamy, S. 2018. *COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Depublish
- Sabaruddin, A., 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta

### Jurnal

- Arianti, Devi dan Lena, S. 2018. Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tartohargo Kecamatan Kreketek Kabupaten Bantul. hal : 9
- Harmawan, N. dkk. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Jurnal E Sospol. 4(1) : 52
- Mashudi, & Fauziah, L. 2019. Formulasi Pengembangan Destinasi Wisata : Tinjauan Strategis dalam Perspektif Collaborative Governance. Conference on Public Administration and Society. 1 (1) : 416-417
- Buku Saku BNPB. 2012. *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana